

ORIENTASI MODAL SOSIAL DAN MODAL KULTURAL DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN U.N.Y.

Sumarno; Haryanto; Bambang Saptono
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: sumarno@uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami, seberapa dan bagaimana perhatian Fakultas Ilmu Pendidikan dengan segenap jajaran sivitas akademika, terhadap konsep modal sosial dan modal kultural dalam pendidikan pada tataran disiplin keilmuan pendidikan dan pada tataran praksis pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei menggunakan angket yang di dalamnya ada model *paired comparison*, *likert scale*, dan pertanyaan terbuka. Angket ini disebarakan kepada para dosen FIP. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: Pertama, perhatian sangat besar terhadap aspek kecerdasan spiritual, jauh melampaui kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial; Kedua, mengenai pendayagunaan dan pengembangan modal kultural, yang dipandang terpenting adalah pendayagunaan modal kultural dalam bidang sosialbudaya (“cukup”), sedangkan pendayagunaan modal kultural dalam bidang keberagamaan pada posisi “kurang”; Ketiga, mengenai pendayagunaan dan andil terhadap berbagai modal sosial, pada umumnya pada posisi “cukup penting”, terutama terhadap modal sosial dalam bidang sosialbudaya; sementara itu terhadap modal sosial dalam kehidupan keberagamaan pada posisi “kurang”. Rekomendasi paling mendesak adalah perlunya dialog yang mencerahkan, sehingga ke depan peran FIP-UNY lebih terarah dalam memajukan pendidikan.

Kata kunci: *modal kultural, modal sosial, fakultas ilmu pendidikan*

SOCIAL CAPITAL ORIENTATION AND CULTURAL MODAL IN THE FACULTY OF EDUCATION THE YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY

Abstract

This research aims to describe, analyse, and understand the extent to which the Faculty of Education, YSU cares about their academic community, social capital and cultural capital on education in terms of educational science discipline and educational practice. Using survey, data were collected with questionnaire in which there are paired comparisons, Likert scales, and open questions. Faculty members at the Faculty of Education involved as subjects in this research. Results show that first, the concern on spiritual quotient is highly stronger than that of intellectual quotient, emotional, and social. Second, in terms of the empowerment and cultural capital development, the empowerment of cultural capital in the field of social-culture is moderate, while the empowerment of cultural capital in the religious field is low. Third, in terms of the empowerment and contribution to several of social capital, averagely is quite important, especially toward social capital in the field of social-culture; while regarding to the social capital in the field of religious field is low. It is recommended that dialog is needed among academic community in the Faculty of Education to improve its roles.

Keywords: *cultural capital, social capital, Faculty of Education*

PENDAHULUAN

Banyak pandangan kritis atas pendidikan, misalnya: bahwa mereka yang terpelajar tidak dengan sendirinya terdidik; bahwa pendidikan yang makin tinggi cenderung menjauhkan anak dari masyarakatnya. Pandangan kritis tersebut menjadi pemicu dilontarkannya pandangan bahwa sebaiknya pendidikan berlandaskan modal kultural dan modal sosial. Dengan demikian anak bangsa yang lebih banyak mengenyam pendidikan, akan berarti lebih kaya dengan muatan nilai-nilai budaya, lebih berperadaban, dan tidak tercerabut dari akar masyarakatnya.

Hubungan antara pendidikan dengan lingkungan sosial dan budaya tidak hanya searah, bahwa pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan; akan tetapi pendidikan diharapkan juga mampu memberikan andil positif terhadap lingkungannya. Pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, melainkan baik lewat lulusannya maupun lewat karya yang lain, pendidikan juga menghasilkan karya-karya kreatif yang memperkaya khasanah sosial dan budaya masyarakatnya.

Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan satuan di dalam sistem pendidikan tinggi yang berada pada posisi kunci untuk dapat mengawal muatan nilai, arah, dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai upaya awal ke arah peran tersebut, dengan mengidentifikasi bagaimanakah sebenarnya diskursus atau wacana akademik yang hidup di fakultas ini. Fokus penelitian dapat dirumuskan ringkas sebagai berikut: "Bagaimanakah perhatian Fakultas Ilmu Pendidikan terhadap konsep modal sosial dan modal kultural dalam pendidikan pada tataran disiplin keilmuan pendidikan dan pada tataran praksis pendidikan."

Dengan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami, seberapa dan bagaimana perhatian Fakultas Ilmu

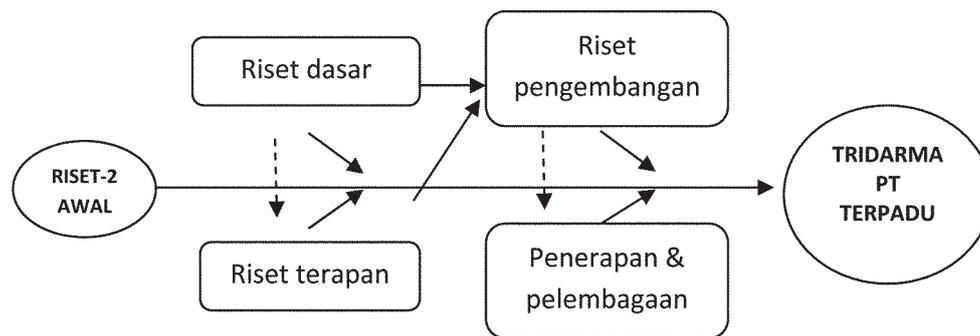
Pendidikan dengan segenap jajaran sivitas akademika, terhadap konsep modal sosial dan modal kultural dalam pendidikan pada tataran disiplin keilmuan pendidikan dan pada tataran praksis pendidikan.

Modal Sosial

Modal sosial pada hakekatnya adalah adanya tingkat kepercayaan (*trust*) yang tercermin pada efektifnya jaringan inter-relasi sosial. Modal sosial ini dapat bersifat sangat informal dengan organisasi yang tidak jelas bentuknya, misalnya *paguyuban* yang sudah lama dikenal dalam referensi sosiologi di Indonesia. *Paguyuban* tersebut sangat berbeda dengan *patembayan* yang memang kental dengan kepentingan. Baik yang sangat informal maupun yang bersifat formal dengan organisasi yang rapi, semuanya merupakan modal sosial. (Burnheim, 2004).

Sesuai dengan banyaknya bidang kegiatan di masyarakat, ada urusan kesejahteraan, urusan jati-diri, dan urusan kekuasaan; maka modal sosialpun juga mencakup berbagai bidang kehidupan tersebut. Ada modal sosial dalam bidang ekonomi misalnya kelompok arisan yang sangat informal, sampai dengan koperasi yang lebih formal, dan bahkan industri mau, serta berbagai organisasi jasa keuangan dan bisnis yang tentu saja sangat formal. Ada modal sosial dalam bidang kemasyarakatan, misalnya "*trah*" yang sangat informal, organisasi seni budaya yang sudah dikelola dengan manajemen modern yang formal. Ada pula modal sosial dalam bidang politik atau kekuasaan, misalnya aliansi kekuasaan yang biasanya informal, yang sangat berbeda dengan organisasi politik yang sangat formal misalnya partai politik, serta berbagai bentuk institusi kenegaraan.

Sebagaimana modal lain, analog dengan sistem produksi, kemanfaatan modal sosial juga sangat bergantung pada cara-cara yang diupayakan untuk melestarikan, memelihara, memperkuat,



Gambar 1. Road Map Penelitian

memperbaharui bila dimungkinkan, dan mendayagunakannya. Salah urus atau penyalahgunaan terhadap modal sosial, akan menghasilkan kerugian dan dampak negatif lainnya. Sebaliknya, pengurusan yang tepat, pengelolaan yang benar, akan menghasilkan energi positif bagi berbagai pihak.

Modal Kultural

Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai-nilai (*values*) mengenai segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendirinya teraktualisasikan dalam realita yang bermanfaat bagi orang yang meyakiniinya, dan atau masyarakatnya. Menurut teori Fishbein, suatu keyakinan untuk menjadi perilaku nyata melalui rangkaian keyakinan – sikap – niat – perilaku. Itupun tidak mulus linier, karena banyak determinan lain yang mempengaruhi pembentukan sikap, dan demikian pula yang mempengaruhi niat, serta perilaku. Memang perilaku manusia tidak selamanya mengikuti alur rasional; teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku, termasuk diam, merupakan fungsi dari stimulus eksternal. Relasi stimulus – respon (S – R) bersifat fungsional mekanis.

Modal kultural juga sangat banyak jenisnya, sebagaimana modal sosial mencakup bidang ekonomi – jatidiri – politik,

modal kultural juga dapat saja dikelompokkan ke dalam tiga bidang tersebut. Di samping pengelompokan tiga tersebut, tidak tertutup kemungkinan pengelompokan lain, sehingga dapat mencakup nilai-nilai keagamaan, keindahan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan lainnya.

Mirip dengan kemanfaatan modal sosial, modal kultural dapat berhenti sebagai mutiara terpendam yang tidak memberikan manfaat apapun. Kemampuan dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk memelihara, melestarikan, memperbaharui, dan memanfaatkannya.

Modal sosial dan modal kultural dalam pengembangan pendidikan

Pendidikan sebagai sistem terbuka secara alami dapat dan perlu menjalin hubungan dialektis dengan modal sosial dan dengan modal kultural. Hubungan dialektis yang dimaksud adalah bahwa: pendidikan memanfaatkan modal sosial dan modal kultural untuk memajukan pendidikan, dan pendidikan diharapkan juga berbuat sesuatu untuk melestarikan dan mentransformasikan modal sosial dan modal kultural tersebut.

Pendidikan yang cerdas dan mencerdakan kehidupan bangsa, tidak akan berbuat yang berakibat menjadikan peserta didik terasing dari akar lingkungan sosial dan lingkungan kulturalnya. Di samping itu anak-anak bangsa yang lebih banyak mengenyam pendidikan akan dapat

berbuat banyak memperkuat dan memperkaya modal sosial dan modal kultural tersebut tanpa harus kehilangan identitas DNA-nya.

Penelitian relevan

Sumarno dkk (2011) melakukan penelitian mengenai modal sosial dan modal kultural di luar kampus Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Penelitian dilakukan di DIY dengan responden para pembuat kebijakan pendidikan di jajaran birokrasi dan di satuan pendidikan, serta para pendidik, di jalur pendidikan formal dan nonformal. Alat pengumpulan data berupa kuesioner tertutup untuk menjangkau data kuantitatif, dan kuesioner terbuka untuk memperoleh data kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, wacana pendidikan holistik sudah dipahami di lapangan; namun persoalannya adalah konfigurasi yang harmonis antar aspek-aspek kecerdasan masih perlu diupayakan, agar supaya tidak terjadi disorientasi pengembangan pendidikan yang parsial reduksionis. *Kedua*, sudah ada pemahaman yang cukup bahwa pendidikan perlu melakukan pendayagunaan, pelestarian, dan pengembangan atas modal sosial yang ujungnya adalah jejaring sosial di berbagai bidang kehidupan yakni keagamaan, kemasyarakatan, dan ekonomi; namun agak kurang komitmen terhadap bidang politik dan hukum.

Ketiga, sudah ada pula pemahaman yang baik atas pentingnya pendidikan melakukan pendayagunaan, pelestarian, dan pengembangan modal kultural yang berupa nilai, dan adat-kebiasaan dalam kehidupan keberagaman, sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi; dan agak kurang tertarik terhadap kehidupan sosialpolitik dan hukum. *Keempat*, indikasi komitmen terhadap kebijakan pendidikan berbasis modal kultural sedikit lebih maju setapak dibandingkan dengan komitmen terhadap kebijakan pendidikan berbasis

modal sosial; baik pada kebijakan yang sudah ada dan dalam proses implementasi, maupun pengembangan kebijakan mendatang.

Terkait dengan simpulan tersebut implikasinya bagi pengembangan Fakultas Ilmu Pendidikan adalah tridarma terpadu dengan tema pendidikan holistik berbasis modal sosial dan modal kultural yakni dalam bidang: 1) pendidikan pendidik non-guru dan pendidikan guru; 2) penelitian dan pengembangan; dan 3) pengabdian pada masyarakat melalui aktivitas layanan profesional.

Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah perlu diketahui terlebih dahulu bagaimanakah diskursus di kalangan akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan sekitar modal sosial dan modal kultural tersebut.

METODE

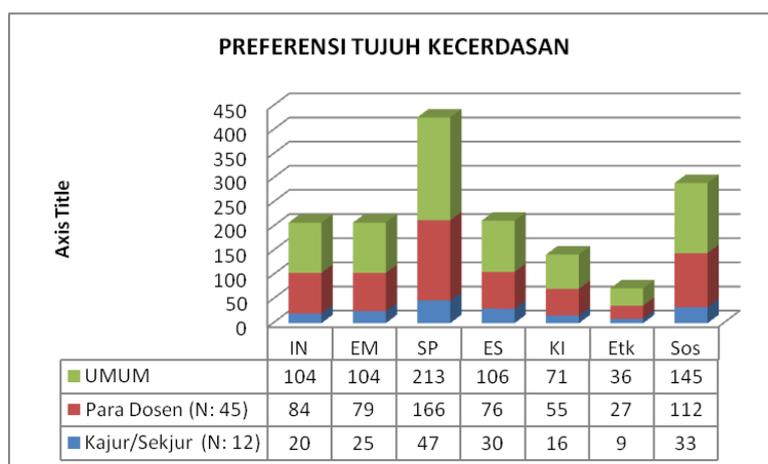
Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian institusional, artinya dirancang sebagai bagian dari kebutuhan pengembangan kelembagaan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari sisi lain dipakai pula kerangka penelitian kebijakan karena hasil penelitian ini, dan hasil-hasil penelitian berikutnya, akan langsung menjadi dasar pertimbangan kebijakan fakultas dalam pengembangan program tridarmanya. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai merupakan gabungan pendekatan positivistik dengan pendekatan kualitatif. Konsep dasar mengenai modal sosial dan modal kultural.

Subjek dan objek penelitian

Sasaran utama penelitian ini adalah "perhatian" fakultas terhadap konsep modal sosial dan modal kultural dalam pengembangan pendidikan. Perhatian tersebut dipindai dari:

opini dosen sebagai pelaku utama pendidikan mengenai konsep modal sosial dan modal kultural dan terapannya dalam pengembangan pendidikan; karya



Gambar 2. Preferensi tujuh jenis kecerdasan

dosen terkait dengan konsep modal sosial dan modal kultural dalam pengembangan pendidikan.

Dengan ketiga fokus tersebut, maka sumberdata penelitian ini adalah: dosen dari semua jurusan/ programstudi; dan pengurus fakultas/ jurusan/ programstudi.

Pengumpulan data dan analisis data

Pengumpulan data dilakukan dengan: angket utk dosen, dan pengurus; wawancara untuk pendalaman informasi; analisis dokumen. Data terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik dan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai komitmen fakultas terhadap konsep modal sosial dan modal kultural dalam pengembangan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Urutan peringkat antar 7 (tujuh) jenis kecerdasan menurut preferensi dosen. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi, bagaimanakah preferensi para dosen dan ketua jurusan di FIP UNY terhadap tujuh jenis kecerdasan yakni kecerdasan intelektual (In), emosional (Em), spiritual (Sp), estetika (Es), kinestetika (Ki), Etika (Et), dan sosial (Sos). Analisis data dari pertanyaan

model *paired – comparison*. Dengan cara ini responden diminta menetapkan salah satu dari setiap pasangan pilihan misalnya In vs Em, In vs Sp, dan seterusnya. Kemudian dilakukan rekapitulasi, berapa kali masing-masing jenis kecerdasan tersebut dinyatakan lebih penting dari pasangannya. Hasil rekapitulasi disajikan dalam gambar 2.

Secara umum dua terpenting adalah kecerdasan spiritual (Sp) dan kecerdasan sosial (So); sedangkan dua pada urutan terendah adalah kecerdasan kinestetika (Es) dan kecerdasan etika (Etk). Secara umum pula ditemukan bahwa kecerdasan intelektual (In) dan kecerdasan emosional (Em) pada kedudukan yang sama, lebih rendah dibandingkan dengan perlunya kecerdasan estetika (Es); namun apabila dipisahkan antara dosen dan pengurus jurusan ditemukan sedikit perbedaan. Menurut para dosen, urutan ke-3,4,5 diduduki oleh kecerdasan intelektual (In), emosional (Em), dan estetika (Es); sedangkan menurut para pengurus jurusan, urutan ke-3,4,5 adalah kecerdasan estetika (Es), emosional (Em), dan baru kecerdasan intelektual (In).

Temuan tersebut menampilkan gejala yang menarik: *pertama*, ada perhatian sangat kuat terhadap persoalan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial; sampai

mampu memposisikan kecerdasan intelektual pada urutan ke-3 menurut para dosen, bahkan jatuh pada urutan ke-5 menurut para pengurus jurusan. Keyakinan terhadap persoalan ini besar pengaruhnya pada kebijakan dan program fakultas, termasuk di dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu patut dilakukan refleksi yang jernih untuk menemukan jawaban sejauh mana ketepatan preferensi yang ditampilkan oleh para dosen dan para pengurus jurusan. Sedemikian tidak pentingkah aspek kecerdasan intelektual di dalam pendidikan.

Kedua, ada sedikit perbedaan preferensi antara dosen yang tidak mengemban tugas tambahan sebagai pengurus, dengan dosen juga tetapi memiliki tugas tambahan sebagai pengurus jurusan. Mereka yang hanya sebagai dosen menempatkan posisi kecerdasan intelektual lebih tinggi dibandingkan teman dosen yang menjadi pengurus jurusan. Menurut para dosen, urutan ke-5 adalah kecerdasan estetika (Es); sedangkan menurut para pengurus jurusan urutan ke-5 adalah kecerdasan intelektual (In). Manakah di antara dua kelompok tersebut yang lebih tepat untuk menghadapi pendidikan kini dan mendatang. Apakah peran sebagai pengurus jurusan menumbuhkan perspektif yang berbeda, karena mereka ini tidak hanya menunaikan tridarma perguruan tinggi saja, melainkan menghadapi urusan

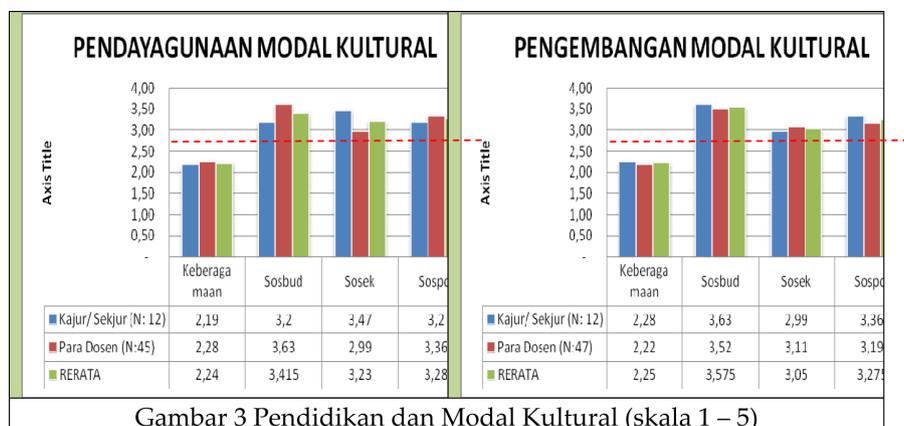
kelembagaan jurusan, dan persoalan akademis serta nonakademis para mahasiswa.

Ketiga, kecerdasan etika, atau penempatan nilai-nilai etika, ditempatkan secara kompak pada urutan terakhir (ke-7). Hal ini membutuhkan perhatian, mengingat persoalan etika, bukan hanya masalah kesantunan, melainkan juga mencakup masalah baik – buruk secara umum. Kalau hal ini dibiarkan, perlu direnungkan bagaimanakah akibatnya; akankah berarti melakukan pembiaran, ataukah mengupayakan reposisi yang lebih tepat ke depan.

Keempat, kecerdasan kinestetika pada posisi urutan ke-6 mudah dipahami, kalau hanya sebagai dosen; akan tetapi kalau mereka ini juga mempersiapkan pendidik, tentunya juga memerlukan perhatian. Pendidikan holistik memandang perlu keserasian antara perkembangan jasmani, mental, dan spiritual. Kebugaran dan kesamaptaaan fisik, diperlukan untuk mendukung keberfungsian aspek-aspek lain dari perkembangan manusia.

Modal Kultural

Di dalam penelitian ini modal kultural mencakup nilai-nilai keberagamaan, sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan sosial-politik. Nilai-nilai keberagamaan meliputi keyakinan yang mengakar pada ajaran agama, dan segala pengamalannya di dalam kehidupan. Nilai-nilai sosial bu-



daya mencakup sikap positif terhadap kehidupan, orientasi ke depan, menghargai prestasi, sikap toleran, keseimbangan ekologis, harmoni, menghargai ipteks, kemandirian, bangga dengan kekayaan budaya bangsa. Nilai-nilai sosial-ekonomi meliputi aspek-aspek kesejahteraan, kerjakeras, hemat, efisien, produktifitas, kualitas, bangga sebagai bangsa yang adil makmur. Nilai-nilai sosial politik dan hukum mencakup di antaranya menghargai hak zasi manusia, kebebasan, kebersamaan, keadilan, bangga terhadap identitas sebagai bangsa yang berdaulat.

Kepada para akademisi ditanyakan seberapa penting: a) kebijakan pendayagunaan berbagai modal kultural di dalam pengembangan pendidikan; dan b) seberapa penting kebijakan yang mengedepankan andil pendidikan terhadap upaya pengembangan modal kultural tersebut. Respon dituangkan ke dalam skala 5 (lima) peringkat. Adapun temuan penelitian ditampilkan dalam gambar 3.

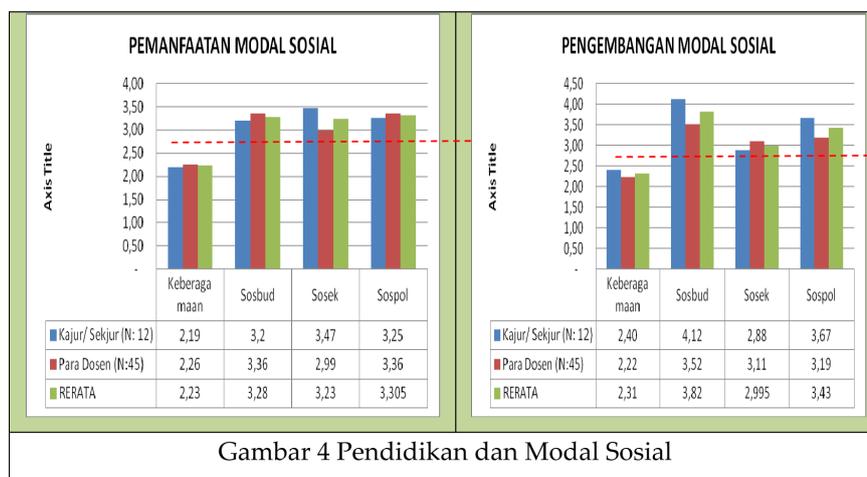
Dari empat rumpun modal kultural, yang terendah adalah nilai keberagamaan, dan tertinggi adalah nilai-nilai sosial budaya. Hal ini bermakna bahwa nilai-nilai keberagamaan dipandang agak kurang penting, sedangkan nilai sosialbudaya lebih dari cukup penting, sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan; yang artinya adalah perlu kebijakan kon-

servasi nilai-nilai budaya tersebut. Adapun modal kultural dalam bidang sosialekonomi, sosialpolitik dan hukum juga sudah dipandang cukup penting sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan.

Pada waktu responden ditanya urgensinya kebijakan pendidikan agar supaya memiliki andil terhadap pengembangan dan transformasi modal kultural, ditemukan juga bahwa pendidikan sangat perlu memiliki andil di dalam pengembangan nilai-nilai sosialbudaya; sementara itu harapan andil terhadap pemutakhiran penerapan nilai-nilai keberagamaan menduduki posisi kurang penting. Andil terhadap transformasi nilai-nilai sosial-politik dipandang cukup urgen, sedikit di atas nilai-nilai sosial ekonomi.

Modal sosial

Bagian berikut mengenai hubungan pendidikan dengan berbagai jenis modal sosial di dalam bidang-bidang keberagamaan, sosialbudaya, sosialekonomi, dan sosialpolitik. Contoh modal sosial bidang keberagamaan adalah badan wakaf dan yang sejenis, yayasan berlandaskan agama sebagai penyelenggara pendidikan, serta berbagai majelis dalam bidang agama. Rumpun modal sosial berikutnya adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM, asosiasi/organisasi profesi, serta yang bergerak di dalam bidang seni,



kebudayaan, dan olahraga. Sedangkan contoh modalsosial dalam bidang ekonomi adalah koperasi, lembaga keuangan mikro, perbankan, perkreditan; dan tentu saja perusahaan. Rumpun modal sosial terakhir yang kurang banyak terpikirkan oleh kalangan pendidikan, namun sebenarnya ada juga relevansinya adalah yang berkecimpung di dalam bidang sosial-politik dan hukum, misalnya: partai politik serta berbagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan penggalangan kekuatan untuk meraih kekuasaan; dan berbagai organisasi yang bersifat advokatif dalam bidang hukum seperti komisi hak asasi manusia, komisi hak anak, ombudsman.

Dari segi pentingnya kontribusi berbagai modalsosial yang harus dipertimbangkan untuk kebijakan pengembangan pendidikan, secara umum, dari yang tertinggi adalah modalsosial dalam bidang sosialbudaya, dalam bidang sosialpolitik/hukum, baru dalam bidang sosialekonomi; semua dalam posisi cukup; dan terakhir adalah modalsosial dalam bidang kehidupan keberagamaan, dalam posisi kurang. Opini mengenai urgensi kebijakan berlandaskan modalsosial dalam bidang sosialekonomi, agak kontras antara opini para dosen yang pada posisi 3,47 yang jauh di atas opini para pengurus jurusan yang hanya pada posisi 2,99.

Sementara itu pada waktu diajukan pertanyaan sekitar urgensi kebijakan pendidikan yang mengarah pada andil atau kontribusi pendidikan terhadap modal sosial, temuan penelitian ini sebagai berikut. Pendidikan sangat diharapkan memiliki andil kuat terhadap pengembangan modalsosial dalam bidang sosialbudaya, terutama opini para dosen (4,12), jauh lebih kuat dibandingkan dengan opini mengenai perlunya pendidikan memanfaatkan modalsosial dalam bidang sosialbudaya tersebut. Posisi kedua diduduki opini mengenai perlunya andil pendidikan dalam pengembangan modalsosial dalam bidang sosialpolitik/hukum (3,43); juga lebih ting-

gi dibandingkan dengan opini mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang mendayagunakan modalsosial dalam bidang sosialpolitik dan hukum yang hanya 3,05. Dalam bidang ini pula posisi dosen lebih kuat rekomendasinya, dibandingkan dengan para pengurus jurusan. Posisi ketiga adalah dalam bidang sosialekonomi; meski masih pada posisi cukup, namun nampak bahwa peran pendidikan dalam pendayagunaan modalsosial-ekonomi lebih kuat daripada peran pemberdayaan modalsosial-ekonomi. Dalam hal modal sosial dalam bidang politik/hukum ini opini para pengurus jurusan lebih kuat dibandingkan dengan opini paradosen. Dalam kaitannya dengan modalsosial dalam bidang kehidupan beragama atau keberagamaan, menduduki posisi terendah; artinya dipandang kurang urgen pengembangan kebijakan pendidikan yang diharapkan bahwa pendidikan memiliki andil terhadap pengembangan modalsosial dalam bidang keberagamaan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menarik untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Sumarno dkk, 2011) yang dilakukan terhadap jajarannya pembuat kebijakan pendidikan tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta para praktisi di tingkat satuan pendidikan. Ada kemiripan keyakinan mengenai aspek-aspek di dalam pengembangan peserta didik, yakni kuatnya harapan atas pengembangan aspek spiritual. Persoalannya kemudian adalah mirip juga, sebenarnya bagaimanakah proporsi yang serasi di antara aspek-aspek perkembangan kecerdasan manusia. Sedemikian menjadi tidak pentingkah aspek kecerdasan intelektual untuk menghadapi perkembangan zaman yang sudah pasti akan semakin kompleks.

Kalau pandangan yang ada memang sudah tepat, maka temuan ini bermakna positif; karena apa yang dihayati akademisi fakultas ilmu pendidikan sudah

sejalan dengan yang dihayati oleh praktisi pendidikan. Namun, kalau ternyata diskursus yang ada tersebut bermasalah, misalnya terpinggirkannya aspek kecerdasan intelektual, maka temuan ini dapat bermakna negatif; karena pemahaman yang kurang tepat ternyata terjadi baik pada para akademisi maupun para pelaku praktisipendidikan di lapangan. Bila yang kedua ini valid, maka tantangannya adalah diperlukannya perenungan dan perumusan kembali mengenai bagaimanakah komposisi yang tepat antara aspek-aspek kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, etika, estetika, dan kinestetika.

Dalam kaitannya dengan hubungan dialektis antara pendidikan dengan modal sosial dan modal kultural, di DIY kebetulan sudah memiliki kebijakan yang tertuang di dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah no. 5 tahun 2011 yang intinya adalah pendidikan berbasis kebudayaan. Makna dari perda tersebut adalah menghendaki bahwa kebudayaan itu mewarnai tujuan pendidikan, muatan isi pendidikan, dan metoda pendidikan, serta kebudayaan juga diharapkan tercermin di dalam manajemen pendidikan. Harapan ini tentu tidak dapat begitu saja akan diikuti dengan praktik pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tepat, karena mesti didahului dengan menggali, mengidentifikasi aset-aset kebudayaan yang tepat untuk dikembangkan di dunia pendidikan. Belum lagi, bagaimanakah cara yang tepat untuk menjadikannya sebagai tujuan, isi, dan didaktik/metodik pendidikan. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan sinergi kolaborasi peran berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pengembangan Modal Manusia meliputi: perhatian sangat besar terhadap aspek kecerdasan spiritual, jauh melampaui

kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial; untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah: pengembangan kepribadian jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek akademik dan kesiapan kerja; untuk sekolah dan kursus kejuruan: urutan terpenting adalah kesiapan kerja, baru pengembangan kepribadian, dan terakhir akademik; untuk mahasiswa S1: yang paling penting adalah aspek kepribadian, baru aspek akademik, dan kesiapan kerja pada urutan terakhir.

Modal Kultural

Baik untuk kepentingan pendayagunaan dan pengembangan, yang dipandang terpenting adalah pendayagunaan modal kultural dalam bidang sosialbudaya, itu pun masih sekitar "cukup", sedangkan terhaap pentingnya pendayagunaan modal kultural dalam bidang keberagamaan pada posisi "kurang"

Modal Sosial

Urgensi pendidikan berlandaskan berbagai modal sosial, maupun andil pendidikan terhadap pengembangan berbagai modal sosial tersebut, pada umumnya pada posisi "cukup penting", terutama terhadap modal sosial dalam bidang sosialbudaya; sementara itu modalsosial dalam kehidupan keberagamaan pada posisi "kurang".

Rekomendasi

Diperlukan kajian mendalam oleh sivitas akademisi di F.I.P. – UNY untuk menjawab pertanyaan berikut: pertama, pada pendidikan menengah dan pendidikan sarjana (S1): bagaimana proporsi yang tepat antara aspek pengembangan kepribadian dan aspek pengembangan akademik?; kedua, pada tingkat sarjana, seberapa seharusnya perhatian terhadap aspek kesiapan kerja? Di samping itu, diperlukan pencerahan dan penguatan komitmen untuk mengembangkan pendidikan yang berlandaskan dan berkontri-

busi pada modal kultural dan modal sosial. Dengan kata lain diperlukan perhatian khusus untuk memposisikan pendidikan terhadap modal kultural dan modal sosial dalam bidang kehidupan beragama atau kehidupan keberagamaan.

Agar supaya upaya fakultas ilmu pendidikan ini lebih optimal, kiranya kerjasama dengan praktisi pendidikan juga sangat diperlukan yakni dengan jajaran dinas pendidikan DIY dan dinas pendidikan kabupaten/kota, instansi vertikal dalam pendidikan yang ada di DIY yaitu LPMP, P4TK Matematika, P4TK Kesenian; dan juga dengan institusi penyelenggara (yayasan) serta pelaksana/ satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnheim, C. (2004). *Education and social capital* (http://www.education.monash.edu.au/centres/mcrie/docs/education-and-social-capital_041012.rtf)
- Sumarno, Entoh Tohani, dan RB Suharto 2011. *Muatan Konsep Modal Manusia, Modal Sosial, dan Modal Kultural dalam Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan penelitian dibiayai dengan DIPA FIP UNY 2011